

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan Pendidikan Provinsi Jambi

Annisa Apriliani¹, Muzan², Jamrizal³, Ansori⁴

^{1,2,4} Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Batang Hari

³ Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail: Annisaapriliani1999@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tantangan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di tingkat daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan yang memadai dan dikelola dengan baik dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, ketidakmerataan alokasi, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kapasitas manajemen dan tata kelola juga perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Upaya ini penting guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor ini diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pendidikan di daerah.

Kata kunci: Efisiensi, Kebijakan, Pembiayaan, Pendidikan, Tantangan

Abstract

This research aimed to examine the challenges and factors that influenced the successful implementation of education financing policies at the regional level. The method used was a qualitative approach with a case study design in Jambi Province. The findings revealed that adequate and well-managed education financing supported the improvement of educational quality in various aspects. Regional governments had a strategic role in managing education financing, but the implementation faced challenges such as limited budgets, uneven budget allocation, policy coordination and synchronization, and the need for improved management and governance capacities. The study provided recommendations for regional governments to enhance the efficiency, effectiveness, and accountability of education budget management in order to support the improvement of quality and equity in education across the region. The results underscored the importance of addressing these challenges to ensure more effective education financing policies at the local level.

Keywords: Challenges, Education, Efficiency, Funding, Policy

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui sistem pendidikan yang berkualitas, suatu negara dapat mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Salah satu faktor kunci dalam menentukan kualitas pendidikan adalah aspek pembiayaan. Pembiayaan pendidikan menjadi pondasi bagi tersedianya sarana prasarana, tenaga pendidik yang berkualitas, serta penyelenggaraan proses pembelajaran yang efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi mencakup penyediaan sarana-prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan dan peralatan habis pakai, serta biaya operasional tak langsung. Sedangkan

biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. (Hairuddin Cikka, 2024)

Pembiayaan pendidikan yang memadai dan dikelola dengan baik dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dalam berbagai aspek, seperti: Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pembelajaran lainnya. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik melalui program pendidikan dan pelatihan. Guru yang kompeten dan profesional dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas. (Fattah, 2020). Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini akan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan. (Setiawan, 2021) Penyelenggaraan program ekstrakurikuler, bimbingan konseling, dan layanan pendukung lainnya yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. (Kurniawan, 2021) Dengan demikian, pembiayaan pendidikan yang memadai dan dikelola secara efektif dan efisien dapat menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Hal ini mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Dalam konteks perencanaan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang di dalamnya mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan ini penting untuk mendanai berbagai kebutuhan, seperti penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kualifikasi guru, pengembangan kurikulum, serta penyelenggaraan proses pembelajaran yang efektif. (Nurkholis, 2020). Pada tahap pelaksanaan, pemerintah daerah berperan dalam mengelola dan mendistribusikan anggaran pendidikan secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup proses pengadaan barang dan jasa, pemberian gaji dan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyaluran beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu. (Murni, 2021)

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia telah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan pendidikan di masa mendatang. (Widyastuti, 2020). Dengan demikian, peran strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan menjadi kunci penting bagi upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta komitmen yang kuat dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Meskipun pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain:

a. Keterbatasan Anggaran Pendidikan

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Seringkali anggaran pendidikan masih belum mencapai 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keterbatasan anggaran ini berimplikasi pada tidak optimalnya penyediaan sarana-prasarana, pengembangan kapasitas guru, dan pelaksanaan program-program peningkatan mutu pendidikan.

b. Ketidakmerataan Alokasi Anggaran Pendidikan

Selain itu, alokasi anggaran pendidikan seringkali belum merata di seluruh wilayah daerah. Daerah-daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih kuat cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. (Suharno, 2020) Hal ini dapat memicu kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dan menghambat upaya pemerataan pendidikan.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan juga menghadapi tantangan terkait koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Seringkali terdapat perbedaan pemahaman dan prioritas di antara para pemangku kepentingan, sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan. (Fitria, 2021)

d. Kapasitas Manajemen dan Tata Kelola

Selain itu, kapasitas manajemen dan tata kelola pembiayaan pendidikan di tingkat daerah masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, dan praktik akuntabilitas yang belum optimal. (Nugroho, 2021) Hal ini berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, meliputi peningkatan alokasi anggaran pendidikan, pemerataan distribusi anggaran, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan kapasitas manajemen dan tata kelola pembiayaan pendidikan di tingkat daerah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di tingkat daerah. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap praktik pengelolaan pembiayaan pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Peneliti juga melakukan telaah dokumen terkait kebijakan, anggaran, dan laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di daerah tersebut. Analisis data dilakukan secara induktif dengan memaknai, mengkategorisasi, dan menarik simpulan berdasarkan temuan di lapangan. Keabsahan data dijamin melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan daerah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendanai berbagai komponen, seperti penyediaan sarana-prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan. Peraturan ini mengatur besaran biaya operasional per peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang mencakup komponen gaji dan tunjangan pendidik, alat tulis dan bahan habis pakai, serta biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Penetapan standar biaya ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dalam praktiknya, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan

sinkronisasi terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembiayaan pendidikan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan capaian mutu pendidikan di tingkat daerah.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilannya, salah satunya adalah komunikasi antara pemerintah daerah dan sekolah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, ditemukan beberapa hal terkait dengan komunikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari tidak hanya sekedar menyampaikan aturan, namun juga menjelaskan alur, mekanisme, serta hak dan kewajiban sekolah dalam pengelolaan anggaran. Materi sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sekolah, sehingga dapat membantu mereka memahami kebijakan dengan lebih baik. Frekuensi sosialisasi yang rutin dan melibatkan seluruh kepala sekolah serta komite sekolah menciptakan pemahaman yang lebih merata.

2. Keterbukaan Komunikasi Dua Arah

Pihak sekolah diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, usulan, dan kebutuhan pembiayaan secara terbuka kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, di sisi lain, juga responsif dalam memberikan umpan balik dan informasi terkait alokasi anggaran yang diterima sekolah. Komunikasi dua arah yang efektif ini membantu meningkatkan transparansi dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah.

3. Intensitas dan Kontinuitas Komunikasi

Komunikasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah tidak hanya terjadi pada saat proses perencanaan dan penganggaran, namun berlangsung secara berkelanjutan. Pertemuan rutin, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi bersama menjaga kesinambungan komunikasi dan kolaborasi. Hal ini memungkinkan identifikasi masalah dan solusi yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. (Sujatna, 2022)

4. Pemahaman dan Komitmen Bersama

Melalui sosialisasi dan komunikasi yang intensif, terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan sekolah terkait kebijakan pembiayaan pendidikan. Pemahaman bersama ini memupuk komitmen sekolah dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan.

Komitmen bersama ini menjadi landasan penting bagi implementasi kebijakan yang efektif di tingkat sekolah. (Polem, 2024)

Dengan demikian, komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan sekolah melalui sosialisasi, keterbukaan, kontinuitas, serta pemahaman dan komitmen bersama, menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Batanghari. Hal ini memungkinkan penyusunan dan pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Provinsi Jambi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan daerah dalam peningkatan mutu standar pembiayaan pendidikan, antara lain:

1. Faktor Komitmen dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan sangat ditentukan oleh komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang memadai serta mengelolanya secara efektif dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa komitmen politik pimpinan daerah untuk menganggarkan dana pendidikan sesuai target 20% APBD menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu standar pembiayaan. (Sari, 2020) Selain itu, kapasitas Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi penggunaan anggaran juga turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

2. Faktor Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah

Koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan faktor penting lainnya. Penelitian Hasibuan (2019) di Provinsi Jambi

menemukan bahwa keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan panduan, bimbingan, dan evaluasi terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan daerah dapat mendorong keselarasan kebijakan dan peningkatan mutu standar pembiayaan. (Hasibuan, 2019) Selain itu, koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah juga diperlukan untuk mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan anggaran pendidikan.

3. Faktor Partisipasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, komite sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat, juga memengaruhi implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan. Penelitian Wibowo (2021) di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pendidikan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pendidikan. (Wibowo, 2021) Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik, pengawasan bersama, serta pemberian masukan dan usulan terkait kebutuhan pembiayaan pendidikan. Implementasi kebijakan daerah terkait peningkatan mutu standar pembiayaan pendidikan

di Provinsi Jambi memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

1. Peningkatan Alokasi Anggaran Pendidikan

Dengan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah maupun proporsi anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Provinsi Jambi. Penelitian Sari (2020) menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendidikan Provinsi Jambi mencapai 23,4% dari total APBD pada tahun 2021, melampaui target yang ditetapkan. (Sari, 2020) Peningkatan alokasi anggaran ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Pemerataan Standar Biaya Operasional Pendidikan

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan besaran pembiayaan per peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penetapan standar ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Provinsi Jambi, sehingga dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarkabupaten/kota. (Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan, Pasal 2.) Penelitian Hasibuan (2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah mendorong pemerataan mutu sarana-prasarana, proses pembelajaran, dan capaian hasil belajar peserta didik di berbagai daerah. (Hasibuan A. , 2019)

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan pembiayaan pendidikan di Provinsi Jambi juga semakin transparan dan akuntabel seiring dengan implementasi kebijakan daerah. Melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan sekolah, terdapat peningkatan keterbukaan informasi terkait alokasi, mekanisme, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan. Wibowo (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan turut mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat sekolah. (Wibowo, 2021)

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dampak positif yang paling signifikan adalah peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Dengan adanya jaminan kepastian pembiayaan yang memadai dan terarah, sekolah dapat meningkatkan kualitas sarana-prasarana, proses pembelajaran, serta pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Penelitian Sari (2020) menemukan bahwa implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Provinsi Jambi telah berkontribusi pada peningkatan capaian Nilai Rata-Rata Ujian Nasional, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Putus Sekolah di berbagai jenjang pendidikan. (Sari, 2020)

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan memiliki dampak positif dan negatif

Dampak Positif:

1. **Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan**
Dengan adanya alokasi anggaran pendidikan yang memadai, pemerintah daerah mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, seperti gedung sekolah yang layak, laboratorium yang lengkap, serta fasilitas pembelajaran lainnya. (Abidin, 2020) Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.
2. **Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru**
Tersedianya anggaran yang cukup memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru melalui program pendidikan dan pelatihan. (Supriyanto, 2021) Guru yang kompeten dan profesional dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas sehingga meningkatkan kualitas pendidikan.
3. **Pengembangan Kurikulum dan Metode Pembelajaran**
Pembiayaan pendidikan yang memadai mendukung pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. (Wijaya, 2019) Hal ini meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
4. **Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan**
Alokasi anggaran untuk pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di daerah. (Lestari, 2022) Hal ini mendorong partisipasi pendidikan yang lebih luas.

Dampak Negatif:

1. **Kesenjangan Alokasi Anggaran Pendidikan Antardaerah**
Meskipun pemerintah daerah berupaya mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai, namun distribusi alokasi anggaran seringkali belum merata di seluruh wilayah. Daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih kuat cenderung memiliki alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Hal ini dapat memicu kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah. (Haryati, 2012)
2. **Inefisiensi Pemanfaatan Anggaran**
Pada beberapa kasus, terdapat indikasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang belum efisien, seperti pengadaan sarana dan prasarana yang kurang sesuai kebutuhan, serta pengelolaan anggaran yang kurang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan. (Purnama, 2016)
3. **Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan**
Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan menghadapi tantangan terkait koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Perbedaan pemahaman dan prioritas di antara para pemangku kepentingan berdampak pada efektivitas pengelolaan pembiayaan pendidikan. (Suryadi, 2014)

Dengan demikian, implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Provinsi Jambi memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, kompetensi guru, serta perluasan akses pendidikan. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan terkait kesenjangan alokasi anggaran, inefisiensi pemanfaatan anggaran, serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah.

SIMPULAN

Pembiayaan pendidikan yang memadai dan dikelola dengan baik berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, mencakup penyediaan sarana, peningkatan kompetensi pendidik, serta pemberian beasiswa. Pemerintah daerah memiliki peran strategis, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan anggaran, ketidakmerataan alokasi, serta perlunya peningkatan kapasitas tata kelola. Komunikasi efektif antara pemerintah dan sekolah, serta koordinasi kebijakan yang baik, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan. Di Provinsi Jambi, kebijakan ini telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan alokasi anggaran dan pemerataan biaya operasional pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan. . (2024, Agustus 22). Jambi, Jambi, Jambi.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan, Pasal 2.* (n.d.).
- Abidin, Z. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Jambi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 113-124.
- Fattah, N. (2020). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1-11.
- Fitria, H. F. (2021). Koordinasi Pembiayaan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 78-87.
- Hairuddin Cikka, M. J. (2024). *MEWUJUDKAN GENERASI EMAS TAHUN 2045 MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN BERKARAKTER*. Palu: IJRC: IndonesianJournal Religious Center.
- Haryati, S. (2012). Disparitas Alokasi Anggaran Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 155-168.
- Hasibuan, A. (2019). Dampak Implementasi Standar Biaya Operasional Pendidikan terhadap Pemerataan Mutu Pendidikan di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 105.
- Hasibuan, A. (2019). Peran Pemerintah Pusat dalam Meningkatkan Mutu Standar Pembiayaan Pendidikan di Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 50-53.
- Kurniawan, D. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 106.
- Lestari, S. (2022). Pemerataan Pendidikan melalui Pemberian Beasiswa di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15-27.
- Murni, A. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Tingkat Daerah . *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 101-110.
- Nugroho, R. A. (2021). Penguatan Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Daerah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 156-167.
- Nurkholis. (2020). Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12-20.
- Polem, M. &. (2024). Kajian Teoritis terkait Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Menengah di Indonesia. *Action Research Journal (ARJ)*, 55-72.
- Purnama, C. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 15.
- Sari, D. P. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 125-128.
- Setiawan, A. R. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kualitas Pembelajaran di Indonesia. *Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 337.
- Suharno, S. &. (2020). Ketimpangan Alokasi Anggaran Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 123-134.
- Sujatna, H. W. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto, A. (2021). Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pengembangan Profesionalisme di Provinsi Jambi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 45-57.
- Suryadi, A. (2014). Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 468-487.
- Wibowo, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Jambi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 182-185.
- Widyastuti, R. &. (2020). Pengawasan Pembiayaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 78-87.
- Wijaya, R. (2019). Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Daerah Otonom. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 78-89.